

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Krisis keuangan global yang terjadi pada akhir tahun 2008 mempengaruhi kondisi perbankan di Indonesia, dampaknya menyebabkan terganggunya kinerja keuangan perbankan. Banyak perusahaan besar yang terkena dampaknya tetapi tidak dengan UMKM yang tetap bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi. UMKM bertahan diantaranya disebabkan karena UMKM tidak memiliki ketergantungan pada bahan baku impor maupun modal dari asing sehingga ketika terjadi pelemahan mata uang rupiah, mereka tidak terdampak (Nisa, 2016).

Didukung menurut penelitian dari (Purba dkk, 2013) perekonomian Indonesia bertahan dari pengaruh krisis ekonomi global sebab adanya peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) karena ketahanan perekonomian Indonesia dari pengaruh krisis ekonomi global tidak terlepas dari peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) karena UMKM mengutamakan sumber bahan baku dari sumber domestik dan juga bersumber dari pasar domestik. Dibalik UMKM yang bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi sampai sekarang tahun 2017, pertumbuhan UMKM cukup baik di Indonesia, UMKM di Sumatera Barat pada tahun 2017 ini mencapai 580.344 unit.

Dibalik perkembangan UMKM di Indonesia masih memiliki berbagai kendala (Hamidi, 2011). Kendala tersebut yaitu kredit perbankan yang sulit untuk diakses oleh UMKM karena prosedur yang rumit, kurangnya akses bank di pelosok daerah dan yang paling utama yaitu masalah permodalan dalam mengembangkan usaha UMKM (Urata, 2000). Untuk masalah modal tersebut ini dapat diatasi dengan peminjaman uang ke lembaga keuangan. Di sinilah peran lembaga keuangan untuk dapat berperan pada peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberian akses atas keperluan sumber daya uang.

Menurut (Niteriasihani dkk, 2016) lembaga keuangan yang strategis dan tepat untuk membantu permodalan bagi UMKM yaitu BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Karena BPR fleksibel dalam hal pola dan model pinjaman, prosedur yang tidak rumit, dan mengutamakan pendekatan personal, dan lokasi yang menjangkau daerah-daerah yang tidak dijangkau oleh bank umum, serta letak BPR yang dekat dengan masyarakat. Menurut (Hamidi, 2011) lembaga keuangan yang berpengaruh dalam membantu perkembangan UMKM didaerah yakni BPR. Maka selaku lembaga keuangan mikro, peran BPR dalam memberikan kredit sangat diperlukan bagi UMKM dalam meningkatkan modalnya untuk menjalankan dan perkembangan usahanya.

Menurut Binangkit (2014) BPR dalam memberikan/menyalurkan kredit menurut secara umum di pengaruhi dari segi permintaan (*demand*) digambarkan masyarakat mengajukan pinjaman uang ke BPR. Dilihat dari segi penawaran (*supply*) yaitu suatu BPR melakukan penyaluran kredit. Keadaan BPR di Indonesia sendiri

berdasarkan data Bank Indonesia pada tahun 2016 , jumlah kredit yang disalurkan BPR mencapai Rp 81,68 triliun dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 92,97 triliun.

Kemampuan jumlah kredit yang disalurkan pada BPR dipengaruhi atas beberapa faktor (Vhietrin Gift, 2017). Menurut Bustari Muchtar, dkk (2016) dan Sigit Triandaru, Totok Budi Santoso (2006) menyatakan bahwa jumlah kredit yang disalurkan bank dipengaruhi oleh faktor yang bisa dinilai dari penilaian tingkat kesehatan bank, karena jika bank tersebut dalam kategori sehat maka bank akan bisa melakukan kegiatan operasionalnya yaitu menyalurkan kredit. Faktor yang pertama DPK (Dana Pihak Ketiga) yaitu dana yang dikumpulkan dari masyarakat/ UMKM berbentuk tabungan dan deposito.

Kedua, yaitu kredit yang mengalami masalah dihitung dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL). Ketiga, terlihat dari kondisi perbankan itu sendiri yang terdiri dari yaitu aspek likuiditas *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yaitu rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang disalurkan terhadap jumlah dana berasal dari masyarakat dan modal bank sendiri yang digunakan.

Selanjutnya faktor yang keempat, aspek permodalan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu rasio untuk mengukur kecukupan modal bank dalam mengatasi aktiva yang mengandung resiko. Faktor ke lima yaitu faktor rentabilitas atau tingkat keuntungan yang terlihat dari *Return On Asset* (ROA) yaitu rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola aktiva yang menghasilkan keuntungan.

Keenam, rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) rasio yang mengukur kemampuan dan efisiensi bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Terlihat juga dari penelitian menurut (Purba, Syaukat, Maulana, 2016) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit pada BPR konvensional di Indonesia yaitu DPK, LDR, NPL, BOPO, dan ROA.

Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 merupakan peringkat ke 5 jumlah BPR tertinggi di Indonesia. Pertumbuhan jumlah kredit yang disalurkan juga berfluktuasi dan faktor DPK, NPL, LDR, CAR, BOPO, dan ROA yang berfluktuasi dari tahun 2012-2017. Hal ini karena DPK, NPL, LDR, CAR, BOPO, dan ROA yang juga berfluktuasi, sehingga kredit yang disalurkan juga berfluktuasi. Jumlah kredit yang disalurkan BPR Sumatera Barat meningkat dari tahun 2012-2013, tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan. Lalu dari tahun 2015-2017 meningkat lagi. Pada tahun 2015 sebesar 1,01 triliun, meningkat pada tahun 2016 sebesar 1,03 triliun dan pada tahun 2017 meningkat lagi sebesar 1,04 triliun.

Penurunan jumlah kredit yang disalurkan tahun 2014 ini diiringi LDR dan ROA yang menurun pula, BOPO dan NPL meningkat. Tetapi DPK dan CAR malah mengalami peningkatan, ini tidak sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa jika jumlah kredit yang disalurkan berhubungan positif dengan DPK. Artinya jika jumlah kredit yang disalurkan menurun, maka DPK juga akan mengalami penurunan. Pada tahun 2014 ke 2015 jumlah kredit yang disalurkan meningkat lagi, DPK meningkat tetapi jumlah NPL dan BOPO meningkat, LDR menurun, CAR dan ROA pun menurun di tahun 2015 (Bank Indonesia, 2012-2017 diolah).

Pada BPR 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, jumlah kredit yang disalurkan tertinggi dari tahun 2012-2017 terdapat pada kabupaten Tanah Datar dengan rata rata jumlah kredit yang disalurkan sebesar 137.943.591 miliar. Penyebabnya terlihat dari tingkat DPK, CAR, LDR dan ROA yang termasuk tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. DPK kabupaten Tanah datar sebesar 133.850.764 miliar artinya masyarakat di Tanah Datar banyak yang menyimpan dananya ke BPR, karena terlihat dari dana yang dihimpun dari masyarakat yang juga tinggi, CAR sebesar 16.99 persen, LDR sebesar 81.11 persen, ROA sebesar 1.06 persen. Dan seiring dengan NPL yang termasuk rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya yaitu 7,88 persen dan BOPO sebesar 92,97 persen (Bank Indonesia, 2012-2017 diolah)

Sedangkan dari tahun 2012-2017 jumlah kredit yang disalurkan BPR terendah terdapat pada kabupaten Dharmasraya dengan rata-rata sebesar 1.780.388 miliar. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Dharmasraya tidak banyak yang menyimpan dananya ke BPR, karena terlihat dari dana yang dihimpun dari masyarakat yaitu DPK yang paling rendah diantara kabupaten/kota lainnya yaitu sebesar 239.986 miliar. Sebab lainnya karena masyarakat banyak yang tidak mampu mengembalikan kredit yang dipinjam sehingga kredit bermasalah yang terlihat dari tingkat NPL yang tinggi sebesar 27,16 persen. Serta LDR yang paling rendah dari kabupaten/kota lainnya sebesar 47,12 persen (Bank Indonesia, 2012-2017 diolah).

Maka berdasarkan dari latar belakang diatas serta fenomena naik turunnya faktor DPK, NPL, CAR, LDR, BOPO dan ROA yang tidak seiring maupun seiring dengan naik turunnya jumlah kredit yang disalurkan mendorong peneliti melihat pengaruh DPK, NPL, CAR, LDR, BOPO dan ROA terhadap jumlah kredit yang

disalurkan untuk itu saya melakukan penelitian dengan judul“ Analisa Pengaruh DPK, NPL, CAR, LDR, BOPO dan ROA terhadap Jumlah Kredit yang di Salurkan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2017”

## 1.2 Rumusan masalah

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai permasalahan yakni dalam segi permodalan untuk mengembangkan usahanya, kredit perbankan yang sulit untuk diakses oleh UMKM karena prosedur yang rumit, kurangnya akses bank di pelosok daerah karena UMKM sendiri banyak terdapat di daerah-daerah. Maka UMKM membutuhkan pinjaman uang berupa kredit ke lembaga keuangan . Lembaga keuangan yang tepat untuk UMKM yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR), karena BPR fleksibel dalam hal pola dan model pinjaman, prosedur yang tidak rumit, dan mengutamakan pendekatan personal, dan lokasi yang menjangkau daerah-daerah yang tidak dijangkau oleh bank umum, serta letak BPR yang dekat dengan masyarakat (Purba dkk, 2016).

BPR dalam menyalurkan kredit memiliki faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor DPK (Dana Pihak Ketiga), NPL ( *Non Performing Loan*), CAR (*Capital Adequacy Ratio*), LDR ( *Loan to Deposit Ratio*), BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) dan ROA (*Return On Asset*). Dari data naik turunnya faktor DPK, NPL, CAR, LDR, BOPO dan ROA yang tidak seiring maupun seiring dengan naik turunnya jumlah kredit yang disalurkan, maka dari penjelasan latar belakang diatas maka penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh secara parsial DPK, NPL, CAR, LDR, BOPO dan ROA terhadap jumlah kredit yang disalurkan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di 19 Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan DPK, NPL, CAR, LDR, BOPO dan ROA terhadap jumlah kredit yang disalurkan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di 19 Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat ?

### 1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang didapat, maka didapatkan tujuan penelitian yang dilakukan yaitu:

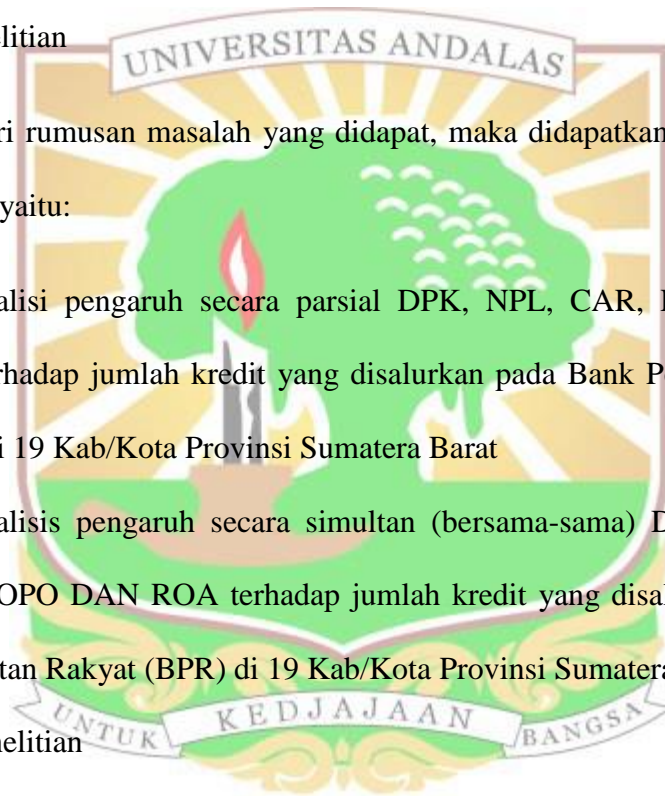
1. Menganalisis pengaruh secara parsial DPK, NPL, CAR, LDR, BOPO dan ROA terhadap jumlah kredit yang disalurkan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di 19 Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat
2. Menganalisis pengaruh secara simultan (bersama-sama) DPK, NPL, CAR, LDR, BOPO DAN ROA terhadap jumlah kredit yang disalurkan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di 19 Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat

### 1.4 Manfaat penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yakni:

#### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa meningkatkan wawasan, pengetahuan dan informasi mengenai pengaruh DPK, NPL, LDR, CAR, BOPO, dan ROA terhadap jumlah kredit yang disalurkan pada BPR di 19 Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat



## 2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini agar bisa menjadi sumbangan pemikiran serta bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan perbankan, terutama dalam penyaluran kredit di BPR

### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini yaitu membahas mengenai tentang “Analisa Pengaruh DPK, NPL, CAR, LDR, BOPO Dan ROA terhadap jumlah kredit yang disalurkan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di 19 Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat”. Pengambilan data untuk melakukan pembahasan lebih mendalam mengenai research question adalah dengan data sekunder yaitu melihat data BPR kab/kota provinsi Sumatera Barat melalui website [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

### 1.6 Sistematika penulisan

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pembahasan ini dimulai dengan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan. Pembahasan ini ditempatkan di bab pendahuluan karena pembahasan ini menjadi titik tolak untuk melakukan penelitian atau penulisan selanjutnya.





## BAB II. KERANGKA TEORI DAN TEMUAN EMPIRIS

Pembahasan pada bab ini membahas tentang landasan teori, konsep, definisi dan penjelasan yang berhubungan dengan tentang Pengaruh DPK, NPL, CAR, LDR, BOPO DAN ROA terhadap jumlah kredit yang disalurkan, memberi gambaran variabel, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

## BAB III. METODOLOGI

Pembahasan bab ini yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yang terdiri dari: jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis, pemilihan model regresi data panel, pengujian model dan definisi konseptual dan definisi operasional.

## BAB IV. GAMBARAN UMUM

Berisikan gambaran umum (deskripsi objek penelitian yang diperoleh), pembahasan masalah dan implikasi kebijakan.

## BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang memperlihatkan hasil penelitian.

## BAB VI. PENUTUP

Berisikan kesimpulan hasil dari penelitian dan saran kebijakan yang bisa di ambil berdasarkan hasil dari penelitian.

